

KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI
PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

DAVID SETIAWAN
NPM. 0944010014

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
PEMINATAN/KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
SURABAYA
2013

**KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI
PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN**
(Sufism and Cultural Studies: Turkey Foreign Policy During Erdogan's Era)

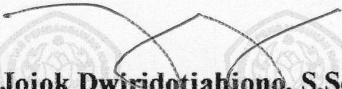
Disusun Oleh:

DAVID SETIAWAN
NPM. 0944010014

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi


Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

Mengetahui

DEKAN


Dra. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 195597181983022001

**KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI
PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN**

(Sufism and Cultural Studies: Turkey Foreign Policy During Erdogan's Era)

Oleh:
DAVID SETIAWAN
NPM. 0944010014

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan
Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 September 2013

Pembimbing

Tim Penguji:
1. Ketua

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

Juwito, S.Sos, MSi
NPT. 367049500361

3. Anggota

Drs. Saifuddin Zuhri, MSi
NPT. 370069400351

Mengetahui,
DEKAN
Dra. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 19559718198302200

YAYASAN KESEJAHTERAAN
PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
FAKULTAS
DEKAN
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI
PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN
(Sufism and Cultural Studies: Turkey Foreign Policy During Erdogan's Era)

Disusun Oleh:

DAVID SETIAWAN
NPM. 0944010014

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

Mengetahui

D E K A N

Dra. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 195597181983022001

KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME
DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI
PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN
(Sufism and Cultural Studies: Turkey Foreign Policy During Erdogan's Era)

Oleh:
DAVID SETIAWAN
NPM. 0944010014

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan
Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 September 2013

Pembimbing

Tim Penguji:

1. Ketua

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos,MSi
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

Juwito, S.Sos, MSi
NPT. 367049500361

3. Anggota

Drs. Saifuddin Zuhri, MSi
NPT. 370069400351

Mengetahui,
D E K A N

Dra. Hj. Suparwati, MSi
NIP. 19559718198302200

INSPIRATIONAL QUOTE'S

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S Al Baqarah (2) : 186)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. (Q.S An Nissa (4) : 36)

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S Al Hijr (5) : 9)

Alif Laam Miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. (Q.S Al Baqarah (2) : 1-2)

Di dunia ini, dari banyaknya jumlah manusia, hanya sedikit mereka yang sadar. Dari sedikit yang sadar itu hanya sedikit yang ber-Islam. Dari mereka yang ber-Islam, jauh lebih sedikit dari yang berdakwah. dari mereka yang berdakwah, jauh lebih sedikit lagi yang berjuang. Dari sedikit yang berjuang, jauh lebih sedikit yang bersabar. Dan dari sedikit yang bersabar, hanya sedikit saja mereka yang sampai akhir perjalanan. (Hasan Al Banna)

Halaman Persembahan:

*Untuk beliau yang selalu dalam lindungan-Mu:
malaikatku, jiwaku, kebahagiaanku yang ingin
selalu aku upayakan dalam bahagia,
beliau yang kucintai dan kukasihi.
Dan juga untuk beliau yang memberiku inspirasi.....*

*Ibu dan Bapak,
Kakak-kakakku,
guru-guruku,
dan
Recep Tayyip Erdogan
serta seluruh Umat Islam.*

Surabaya, September 2013

David

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya. Dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI PADA MASA ERDOGAN” dapat terselesaikan dengan baik.

Selesainya pembuatan skripsi penulis tidak lepas dari adanya arahan dan bimbingan dari Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi selaku pembimbing utama dan Sarah Anabarja, S.IP, M.Hub.Int. selaku pembimbing pendamping yang dengan segala bimbingan nasehat dan motivasi serta kesabarannya rela meluangkan waktu untuk penulis. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan. Penulis juga menerima banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril, materiil dan spiritual.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dra. Hj. Suparwati, MSi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Juwito, S.Sos, MSi, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Drs. Saifuddin Zuhri, MSi, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Dr. Jojok Dwiridotjahjono, S.Sos, MSi, selaku Ketua Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Bapak dan Ibu Dosen HI, Bu Mega, Bu Tina, Bu Reza, Bu Indira, Pak Aswin, Pak Radityo, dan Pak Tom, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis dan memperkaya pengetahuan penulis mengenai berbagai macam isu-isu dalam dunia internasional.
7. Tokoh Sufi Maulana (Mevlana) Jalaludin Rumi, dan M. Fethullah Gulen atas inspirasi dan perjuangannya.
8. Presiden Abdullah Gul, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Republik Turki Ahmet Davutoglu yang telah memberikan inspirasi sebagai Muslim dan negarawan yang dapat menjadi teladan.
9. Kepada Pak Yakim (Pak Nawawi) dan guru-guru penulis yang telah memberikan banyak ilmu dan nasehat-nasehat serta hikmah.

10. Kepada kedua Orang tua tercinta, yang telah senantiasa memberikan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta tidak lupa selalu memberikan dorongan semangat dan doa yang sungguh luar biasa berupa moriil dan materiil. Dan tidak lupa juga kepada kakak-kakak tercinta, Darwis Harsono dan Ella Yuliana yang selalu memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman dan Sahabat HI 2009. Christopher Oktavianus, Rofino Maia Mota, Umar Faruk, Saddam Husein, Haris Daniswara, Rahman S.K, Taufik Umasugi, Handika S.F, Yanuar Abdullah, R.M Dimas Angga, M. Rizky Febrian, Guguh Winadi, Demas Andre, Rizky Amalia, Aulia A.R, Rizky Pradipta, Anne A.P, Lucia F.R da Silva, Dinda Yamita dan Ishanty Chandra Aziziah. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, doa dan juga bantuannya selama ini.
12. Teman-teman dan Sahabat seluruh HI 2010, 2011 dan 2012. Rendy Oktavianto, Asep Maulana, A. Fawas Gadi, Gazella Rossalina, Annisa, Surviva Ratyatina dan Andika A. Saragih. Terima kasih telah menjadi partner diskusi yang sangat baik sehingga dapat memotivasi penulis melanjutkan bagian-bagian penting dari skripsi.
13. Teman-teman Kelompok Kuliah Kerja Nyata 46 (KKN 46) terimakasih atas ilmu, semangat, kerukunan dan kekeluargaan serta kerjasama yang baik. Wahyu Subandrio, M. Pidya Nooriza, Irfan Wahyudi, Yayi Mirnawati, Ananta Angga. N, Ainur Rofiq S. B, Andini N. M, Novitasari Yekti. A, Muh. Fatkurrahman, Puguh M. P, Imas Nuril. M,

Bambang Sogiantoro, Indrya Natalia, Arindio Afrillian, Dhillan Dholila, Aditya Wicaksono, Wisnu Wasito. A, Aniceto Berlelo, Muh. Arianto, Yohanes Ardhina. S, Indra Wahyu. K, Muh. Hirson A. D, Muh. Faroid, Achmad Affandy. W.

14. Sahabat-sahabat penulis khususnya, Dewa Made Yuda, Heny Kuswanti, Khamida Widyastuti, Aida Chusnil Khotimah, Maulana Rahmadi, Ryan Afriansyah, Dicky Fattah Rianto, Ridho Andri dan Andik Ardianto. Terima kasih telah memberikan semangat, kesempatan menimba ilmu, dukungan, dan serta doanya yang sangat berarti dalam proses mengerjakan skripsi ini.
15. Terima kasih untuk Diaah Rian Setya Ningrum yang telah sabar memberikan semangat, dan doa serta kesediaan waktunya untuk menjadi tempat berdiskusi dan menemani masa-masa sulit penulis dalam mengerjakan proposal hingga skripsi.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari kesemua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Surabaya, September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| INSPIRATIONAL QUOTE'S | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GRAFIK | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 2 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 11 |
| 1.3 Tujuan | 12 |
| 1.4 Manfaat | 12 |
| 1.5 Kerangka Pemikiran | 13 |
| 1.5.1 Tingkatan Analisis | 13 |
| 1.5.2 Landasan Teoritik | 15 |
| 1.5.2.1 Pendekatan Konstruktivisme..... | 15 |
| 1.5.2.2 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri | 17 |
| 1.5.2.3 Sintesis | 19 |
| 1.5.3 Tinjauan Pustaka | 20 |
| 1.6 Hipotesis | 25 |
| 1.7 Metodologi Penelitian | 27 |
| 1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional | 26 |
| 1.7.2 Tipe Penelitian | 33 |
| 1.7.3 Jangkauan Penelitian | 34 |
| 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 1.7.5 Teknik Analisis Data | 36 |
| 1.7.6 Sistematika Penulisan | 38 |

| | |
|---|--------|
| BAB II SUFISME SEBAGAI IDENTITAS DAN KEKHALIFAHAN USMANI | |
| 2.1 Sejarah Perkembangan Sufisme | 40 |
| 2.2 Kekhalifahan Usmani (Ottoman) | 45 |
| 2.3 Masa Keruntuhan Kekhalifahan Usmani di Era Mustafa Kemal Attaturk | 50 |
| BAB III KEMUNCULAN GERAKAN ISLAM PADA MASA PERDANA MENTERI NECMETIN ERBAKAN | |
| 3.1 Kemunculan Kembali Ide dan Gerakan Sufisme | 56 |
| 3.2 Gerakan Institusionalis Islam Era Necmetin Erbakan | 59 |
| BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK TURKI SEBAGAI KEBANGKITAN IDENTITAS SUFISME | |
| 4.1 Definisi Kebijakan Luar Negeri | 65 |
| 4.2 Kebangkitan Ide-Ide Sufisme | 66 |
| 4.3 Kebijakan Luar Negeri Republik Turki Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan: Analisis Kebangkitan Identitas Islam Sufi dan Neo-Ottoman | 69 |
| 4.4 Hasil Kebijakan Luar Negeri dan Peranan Nasional | 73 |
| 4.5 Analisis Kebijakan Luar Negeri Sebagai Praktik | 75 |
| BAB V KESIMPULAN | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perbandingan Kebijakan | 10 |
|--|----|

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1.1 Pendekatan dan Alur Identitas | 16 |
| Grafik 1.2 Kerangka Sintesis | 20 |
| Grafik 1.3 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman | 37 |
| Grafik 1.4 Strategi Erdogan-AKP Dalam Melemahkan Militer | 59 |
| Grafik 1.5 Kerangka dan Alur Pemikiran | 82 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Turkey's Foreign Policy Vision:

An Assessment of 2007 by Ahmet Davutoglu 91

Lampiran 1.2 Principles of Turkish Foreign Policy and

Regional Political Structuring by Ahmet Davutoglu 112

Nama : David Setiawan
Program Studi : Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi
Hubungan Internasional Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Judul Skripsi :

KEBANGKITAN IDE-IDE SUFISME DALAM KEBIJAKAN LUAR
NEGERI REPUBLIK TURKI PADA MASA RECEP TAYYIP ERDOGAN

ABSTRAK

Penelitian ini menjabarkan bangkitnya Sufisme dalam kebijakan luar negeri Republik Turki. Turki memiliki sejarah panjang ketika ide/ajaran Sufisme dan kekhalifahan usmani di Turki dihapuskan negara oleh Mustafa Kemal Attaturk pada tahun 1924. Kekhalifahan Usmani dan Sufisme adalah pendorong perkembangan kemajuan rakyat pada waktu itu. Di sisi lain Sufisme masih diagung-agungkan oleh sebagian kecil masyarakat Turki, meskipun faktor reformasi sekular hingga hari ini masih kuat dipertahankan sebagai dasar negara. Meskipun sufi dilarang, dengan mengamati kebijakan Perdana Menteri Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan, bercita-cita untuk membangkitkan kejayaan Kekhalifahan Usmani melalui kebijakan politik dan kebijakan luar negeri negaranya. Hal tersebut sesuai dengan “Foreign policy vision paper” Republik Turki saat ini. Oleh karena itu, dunia internasional juga mengamati fakta kebijakan yang dihasilkan identik dengan masa kejayaan Kekhalifahan Usmani dan Sufisme-nya sehingga fakta tersebut saat ini disebut sebagai gelombang Neo-Ottomanisme (paham yang menginginkan kebangkitan kembali identitas sufi-usmani)

Keyword's: Kekhalifahan Usmani, Sufisme, Harmoni, Perdamaian, Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP, Kebijakan Luar Negeri, Neo-Ottomanisme.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Republik Turki sekular saat ini berusaha meneruskan ide/ajaran Sufisme yang harmoni dan damai.¹ Menteri Luar Negeri Republik Turki, Ahmet Davutoglu menjadikan ide/ajaran tersebut dibagi dan tertuang sebagai prinsip baru kebijakan luar negeri Republik Turki kedalam 6 (enam) bagian. Pertama, mengarah kegiatan berdiplomasi yang beretika, penyelesaian konflik yang jelas dan bermartabat (rhythmic diplomacy). Kedua, menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, yang bersifat muti dimensional (multi-dimensional foreign policy). Ketiga, menjalin hubungan yang sangat baik, dekat dan ramah kepada negara sekitar Republik Turki (zero problems with neighbors). Keempat, menjadikan Republik Turki sebagai media, aktor yang berinisiatif menyelesaikan masalah dalam kajian politik internasional (order instituting actor). Kelima, menjadikan Republik Turki sebagai negara yang tidak hanya mampu memfasilitasi, menghubungkan kaidah kerjasama internasional dengan negara-

¹ Turkey Foreign Policy 2013. dalam <http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa>, (diakses 17 Februari 2013). Menyebutkan bahwa " In such an environment, developments show us that international legitimacy, economic interdependence, respect for human rights, pursuing a sustainable environmental policy and harmony between people belonging to different religious and ethnic origins stand as the most important tools to build lasting peace, stability and prosperity. The realities of our time also compel us to analyze international dynamics with a global perspective of peace. In other words, Turkey does not only develop its bilateral and regional relations in its close neighborhood, but seeks to create a positive synergy on a much wider scale and thus aims at contributing to global peace, stability and security." ; . Ahmet Davutoglu. Ahmet Davutoglu. Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring. (SAM: Center for Strategic Reseach Ministry of Foreign Affair Turkey). No. 3. April 2012. Hal 1-9.

bangsa tetapi juga mampu menjalin baik kerjasama dengan organisasi internasional (international cooperation). Keenam, ikut serta dalam kebijakan luar negeri yang proaktif, netral, dan menjunjung tinggi nilai fleksibilitas (proactive foreign policy).²

Sebelum Republik Turki menerapkan model sekuler seperti Eropa, pada tahun-tahun kegemilangan Kekhalifahan Usmani tahun 1299-1900, negara ini memiliki perkembangan dari pemikiran-pemikiran Sufisme-Ottomanisme. Di satu bagian yang lain dari Sufisme, mengajarkan kedamaian (harmoni) merupakan sesuatu hal yang mutlak dan harus diciptakan oleh setiap insan manusia didunia. Bila kedamaian itu mampu dipertahankan, maka dampaknya akan memberikan keselarasan dan kecintaan kepada sesama. Sebelum menjadi Republik, Turki adalah negara yang menjadi pemrakarsa Sufisme dari Timur hingga ke Barat.³ Sufisme sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Kekhalifahan Usmani yakni menjalin kedamaian antara Yunani dengan dengan dunia Arab dimasa lalu.⁴

Dalam hal ini, gaya hidup masyarakat Kekhalifahan Usmani mengalami kemajuan dalam bidang agama, sehingga Sufisme-Ottomanisme identik berkaitan dengan Kekhalifahan Usmani. Hal ini memberikan dampak bagi jalannya

² Ahmet Davutoglu. Turkey's Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007. Insight Turkey Vol. 10 / No. 1 / 2008. pp. 77-96. ; Ahmet Davutoglu. Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring. (SAM: Center for Strategic Research Ministry of Foreign Affairs Turkey). No. 3. April 2012. : Ahmet Davutoglu as Minister of Foreign Affairs Republic of Turkey by 2002-Until Present

³ Valdi Hardianto. "Pengertian Sufi" (online) <http://www.scribd.com/doc/52133531/sufi>, (diakses pada 23 November 2011)

⁴ Itzhak Weismann. The Politics Of Popular Religion: Sufis , Salafis , And Muslim Brothers In 20th-Century Hamah. (US: Int. J. Middle East Study). 2005. Hal 39-58.

pemerintahan Kekhalifahan sendiri dan Imperium-imperiumnya di Timur, Balkan, dan sebagian Afrika.⁵

Sekitar tahun 1500-an pemerintahan Sultan Sulaiman I, negara ini mengalami puncak masa keemasannya. Baik dari segi pendidikan, militer, sistem askeri dan re'ya.⁶ Ditambah cepatnya perkembangan Sufisme oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang mengenal politik toleransi beragama sehingga masyarakat dapat merasa tentram. Sema atau tari sufi dipandang sebagai cara menuju penyatuan diri menuju kesucian Tuhan dalam Sufisme.⁷

Adapun masyarakat awam muslim, sebagai sebuah warga atau penduduk awam, diorganisasikan dalam sebuah cara yang sejenis. Kaum muslim terbagi-bagi menjadi sejumlah mazhab hukum dan tarekat. Pihak Kekhalifahan Usmani dengan tegas membawanya di bawah pengendalian negara. Hal ini dikarenakan untuk memperluas dukungan terhadap elit ulama dan sufi. Dukungan Kekhalifahan Usmani ini mengantarkan pada pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas.⁸

Selang beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920, Turki Usmani mengalami kekalahan dalam perang dunia pertama. Ide-ide sufi

⁵ M. Arfan Muamar. Majulah Islam Dengan Menjadi Sekuler?(kasus Turki). (Ponorogo, Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007), hal: 21

⁶ Askeri adalah elit pemerintah yang minoritas, sedangkan re'ya adalah rakyat atau segolongan elit mayoritas yang memiliki hak seluas-luasnya dalam kemakmuran dari negara. Keduanya merupakan sistem stratifikasi yang diciptakan Usmani untuk mengatur negaranya.

⁷ Berputar dan bertumpu pada satu kaki yang menginjak poros bumi sambil berdzikir memuji kebesaran Ilahi. Itulah konsep whirling dervisher atau tarian rumi yang Penciptanya Rumi pada abad ke-12 sebagai sebuah cerminan cinta yang luar biasa terhadap Sang Pencipta. Rasa cinta itu disimbolkan dengan gerakan berputar tanpa henti. Dalam "Tari Sufi" (online) dalam <http://berita.liputan6.com/read/347609/tarian-rumi-simbol-cinta-kepada-allah> (diakses 13 desember 2011)

⁸ M. Arfan Muamar. Majulah Islam Dengan Menjadi Sekuler?(kasus Turki). (Ponorogo, Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007), 18-19.

mengalami kemunduran akibat kemerosotan ekonomi dan tidak terbedungnya ide-ide Barat dari negara yang memenangkan perang, karena dengan mudahnya asimilasi budaya masyarakat Turki yang didukung oleh aspek letak geografis negara ini.⁹

Pada tanggal 3 Maret 1924, Kekhalifahan Usmani secara resmi dihapuskan.¹⁰ Maka dampaknya yang dapat dilihat adalah, selama itu pula Mustafa Kemal Attaturk mencanangkan ide Sekular seperti Barat terutama Eropa.¹¹ Kegiatan tarekat Sufi secara terang-terangan dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah. Meskipun kelompok-kelompok kecil beraliran Sufi Tarekat Maulawiyah (Mevlevi) melaksanakan aktifitasnya secara diam-diam dari pengawasan militer Republik Turki.

Mustafa Kemal Attaturk disebut sebagai bapak bangsa Republik Turki oleh rakyat Turki sehingga, dibawah pemerintahannya, Republik Turki berubah total menjadi sebuah negara sekular yang menurut beberapa pengkajian bisa dibilang anti terhadap dunia Islam, termasuk ide-ide Sufisme-Ottomanisme yang berkembang saat Kekhalifahan Usmani masih dalam kekuasaannya.

Attaturk berhasil memimpin pemerintahan Turki untuk menghapus kekhalifahan Usmani, menjauhkan nilai-nilai Islam yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat Turki tersebut, menjadikan masjid-masjid sebagai museum, program ini terfokus secara total antara tahun 1924 sampai dengan tahun

⁹ Hal ini dibuktikan dengan keterbelakangan Turki mengakibatkan Turki harus mengadopsi kemajuan model pemerintahan di Eropa. Seperti ide-ide sekular dalam pemerintahan republik yang berdaulat penuh oleh rakyat, bukan monarkhi.

¹⁰ M. Arfan Muamar. Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler?(kasus Turki). (Ponorogo, Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007), hal: 28-29.

¹¹ Sekular dalam Turki diartikan sebagai pembatasan, pemisahan, pengurangan sendi agama dalam kehidupan berbangsa bernegara

1938 sehingga menggantinya dari sistem monarki konstitusional Usmani menjadi kearah sendi-sendi republik yang demokratis dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri. Akibatnya sampai tahun 2011 Turki menjadi negara yang murni sekular atas agama (A secular democracy among more than 50 republics with predominantly Moslem population).¹² Indikatornya adalah ada satu kebijakan yang mengindikasikan Attaturk mengurangi hubungan terhadap dunia Arab, yakni penggantian the Latin alphabet was adopted (1928).¹³ Oleh karena itu, penggantian abjad atau huruf Arab yang menjadi sistem baca tulis era Kekhalifahan Usmani dirubah kearah huruf latin secara universal. Sehingga prosesnya pun dalam berkomunikasi dan surat menyurat menggunakan bahasa Latin. Hal ini berlanjut sampai dengan penerus Mustafa Kemal Attaturk diantaranya Perdana Menteri Ismet Inonu, Perdana Menteri Sulayman Demirel, Perdana Menteri Adnan Menderes serta Perdana Menteri lainnya yang berbeda haluan dengan Erbakan yang Islamis.¹⁴

Setelah Republik Turki seperti apa yang dicita-citakan oleh Attaturk berdiri, maka Turki hidup dalam dualisme pola kebijakan luar negeri, namun pada masa Perdana Menteri Necmetin Erbakan pada tahun 1970 mendirikan partai Milli Nizam Partisi (MNP- Partai Ketertiban Nasional) sebagai partai dan gerakan Islam puritan pertama di Turki. Berikutnya, Partai tersebut di kudeta oleh militer karena terlalu kontra dan mengancam sekularisme negara. Tahun 1972, Erbakan

¹² "Mengenai Turki" (online) dalam <http://jakarta.emb.mfa.gov.tr/AboutTurkey.aspx> (diakses 13 desember 2011)

¹³ "Turkey President: Mustafa Kemal Attaturk" (online) dalam <http://www.mfa.gov.tr/mustafa-kemal-ataturk.en.mfa> (diakses 27 desember 2011)

¹⁴ Ahmad Dzakirin. Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu. (Solo: EraIntermedia). 2012. hal: 60

mendirikan partai baru, yakni Milli Salamat Partisi (MSP- Partai Keselamatan Nasional) namun pada tahun 1973 partai ini mengalami perpecahan karena hanya mendapat suara 11,8 persen di parlemen. Kemudian tahun 1977, Erbakan berkoalisi dengan partai sekular Sulayman Demirel dari Partai Adalet Partisi (AP- Partai Keadilan) kemudian koalisi tersebut pecah karena baik Demirel maupun Erbakan berselisih paham. Tahun 1983 Erbakan mendirikan partai Refah Partisi (RP- Partai Kesejahteraan) namun kembali mengalami perpecahan dengan alasan yang sama seperti yang dialami Partai Keselamatan Nasional.

Perjuangan Erbakan tidak hanya berhenti dengan partainya habis di negaranya, tahun 1998 Erbakan kembali mendirikan Partai Fezilet Partisi (FP- Partai Kebajikan) dengan perkembangannya pada tahun 2001 partai ini dibubarkan oleh negara dengan alasan mengancam stabilitas ideologi sekular negara. Pada tahun tersebut Partai Kesejahteraan mengalami perpecahan internal, diantaranya Erdogan dan Abdullah Gul yang sudah tidak sesuai dengan jalan, strategi konfrontasi yang diterapkan oleh Erbakan terhadap partai sekular sehingga mereka mendirikan partai baru yakni Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP- Partai Keadilan dan Kesejahteraan) yang lebih memilih strategi progresif, kultural dan evolutif.¹⁵

Semenjak Erdogan mendirikan AKP bersama Abdullah Gul, partai tersebut memimpin negara sebagai dengan mendapat dukungan dari rakyat sehingga saat ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Republik Turki dijalani dengan dua model, yakni antara Kemalisme (diciptakan oleh Attaturk)

¹⁵ Ahmad Dzakirin. Ibid. 18-24

dan pendekatan Strategic Depth yakni pengembalian kejayaan Usmani (Neo-Ottomanisme) oleh Erdogan dan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu menyadari betul pentingnya sejarah dan warisan kultural dalam menjalankan kepentingan nasional dengan kebijakan zero problem with neighbors.¹⁶ Namun dalam tulisan penelitian ini memfokuskan pada pengembalian kejayaan Usmani sebagai kajian pengambilan kebijakan luar negeri Republik Turki dalam pemerintahan Erdogan.

Dari sini dapat dilihat, adanya upaya Republik Turki untuk melanjutkan kebijakan Zero Enemy dengan seluruh negara dunia menurut prinsip Sufisme yang cinta damai. Politik luar negeri seperti ini yang memberikan keuntungan bagi posisi Turki di Eropa dengan status negara berkembang dan bahkan di Asia sebagai model atau contoh bagi negara-negara Arab (Timur Tengah) untuk menuju kemajuan negara secara signifikan melalui kerjasama internasional.

Pembaharuan arti semboyan negara Republik Turki, Yurtta Barı , Dünyada Barı / Peace at Home, Peace at The World / Damai di Rumah. Damai di Dunia. Erdogan mengupayakan ideologi ini sebagai dasar terciptanya keamanan, ketentraman dan toleransi beragama atas masyarakat Turki yang penuh dengan heterogenitas dari suatu semboyan negara yang pada masa Attaturk hal itu tidak dapat dirasakan masyarakat Turki karena kuatnya militerisme negara dan tidak mau bersentuhan dengan Bangsa Arab.

Hal ini membawa pengaruh dalam level pengambilan kebijakan internasional Turki. Munculnya gagasan ini akibat dari serangkaian sikap Perdana

¹⁶ Ahmad Dzakirin. Ibid. 152

Menteri Erdogan, dia perlahan-lahan mencoba membangkitkan kembali ideologi damai, tanpa musuh dengan teman dekat ala Sufisme kedalam kehidupan masyarakat Turki. Dalam tatanan kebijakan internasional secara historis, Turki adalah negara yang sangat berbeda dari negara Arab lainnya. Ketika dunia Arab masih mempertahankan eksistensi dan konflikktual Sunni-Syiah, Turki bahkan berusaha merangkul seluruh dunia Arab menuju perdamaian. Maka di negara ini, dapat memberikan contoh keberhasilan eksistensi sufisme kedalam sendi pemerintahan negara yang demokratis, stabil, damai dan menghargai satu sama lain.

Implikasinya dalam pertemuan Republik Turki dengan beberapa negara-negara Uni Eropa membahas masalah laporan kemajuan Republik Turki dalam kans sebagai anggota Uni Eropa. Konferensi ini dilaksanakan di Eropa, dimana Eropa sebagai aktor atau sekaligus tuan rumah.¹⁷ Komisi Eropa tahun 2009 menyebutkan bahwa Laporan Kemajuan Turki Dari Segi Pembangunan dan Strategi Negara (seperti di Indonesia disebut sebagai GBHN) pada tanggal 14 Oktober 2009 tersebut. Dalam laporan tersebut, wilayah di negara tersebut mengalami kemajuan lebih pesat dari tahun-tahun sebelumnya.

Pengambilan contoh kebijakan luar negeri tersebut merupakan bentuk analisa partisipasi Republik Turki dalam mengedepankan perjanjian damai dengan berbagai kelompok, agama, bangsa dan negara sebagai salah satu cara untuk mencapai kesepakatan bersama seperti ketika Kekhalifahan Usmani yang mampu mengayomi masyarakat di sekitarnya. Jadi diambil pola masanya dapat dibagi

¹⁷ "Kemajuan Signifikan Republik Turki" (online) dalam <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa> (diakses 12 desember 2011)

menjadi menjadi empat bagian, pertama pada saat Kekhalifahan Ottoman berkuasa, sufisme dan implikasi kulturalnya sebagai ideologi utama dalam sendi negara maka kebijakan luar negerinya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga seperti Arab dan Eropa. Kedua setelah Mustafa Kemal Attaturk menghapus negara khalifah dan menggantinya dengan negara berbentuk republik maka kebijakan luar negeri Turki yakni menjalin hubungan, baik hubungan strategis dan menyeluruh dengan dunia Barat yakni meliputi Eropa dan Amerika Serikat. Ketiga, kemunculan gerakan dan partai Islam oleh pada masa Necmettin Erbakan menandai masa awal perlawanan terhadap rezim sekular ciptaan Attaturk dan pembuat kebijakan lainnya sehingga perlu penggantian sekularisme sebagai ideologi negara menjadi ke arah Islami. Keempat, pada masa Erdogan, Erdogan melakukan serangkaian kebijakan Strategic Depth (penggalan kembali) atau menghidupkan kembali nilai dan identitas Islam, sedangkan di satu sisi, sekularisme yang sangat demokratis dimanfaatkan hanya sebagai salah satu media yang memperkenalkan Islam progresif, kultural dan evaluatif, serta masih menerima kerjasama dengan Barat (Eropa dan Amerika Serikat; Lihat table 1.1)

Tabel 1.1 Perbandingan Kebijakan Dari Usmaniyah hingga Erdogan

| Indikator | Usmaniyah | Attaturk (1925) – Mesut Yilmas (1996) | Erbakan (1996-1997) | Erdogan (2003-Sekarang) |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Politik Domestik dan Politik | Menggunakan Abjad Arab dan Kurdi | Menghapus abjad arab tahun 1928 | Menghidupkan Kembali nilai-nilai islam | Menggunakan Abjad Latin tetapi bahasa |

| | | | | |
|-------------------|---|--|--|---|
| Internasion al | sesuai asal muasal Jalaludin Rumi. Sufisme sebagai Identitas Nasional Menjalin Kerjasama dengan semua pihak sesuai esensi sufi yang damai. | dengan abjad Latin. Mengambil dan mengkodek an Swiss civil law tahun 1926. Menjalin kerjasama dengan Eropa barat. | Konfrontasi total dengan sekularisme | Arab diperbolehkan dalam Madrasah atau sekolah- sekolah. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Baik di Timur tengah (Arab) dan Eropa |
|-------------------|---|--|--|---|

1.2 RUMUSAN MASALAH

Sufisme mampu memberikan ide-ide pemikiran Islam dalam perkembangan awal hingga keruntuhan Kekhalifahan Usmani antara tahun 1299-1900. Setelah kekalahan Usmani dalam perang dunia pertama yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan susutnya pemikiran sufi serta dominannya asimilasi kebudayaan Barat terutama Eropa dan Arab. Turki berevolusi menjadi sebuah negara Republik yang menghapuskan seluruh sendi kehidupan beragama. Dalam kehidupan Turki yang sekular hingga saat ini, muncul kembali ide-ide Sufisme dan Neo Ottomanisme. Puncaknya adalah pada tahun 2009 Erdogan mendukung kerjasama protokol ekonomi Lisboa dengan Uni Eropa serta pada tahun 2011 Erdogan mendukung dan mengunjungi Mesir, Tunisia dan Libya saat Revolusi musim semi Arab, mengupayakan kemerdekaan Palestina dengan mendukung kemenangan Hamas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan satu pertanyaan, yakni: Bagaimanakah ide-ide Sufisme dibangkitkan kembali sebagai landasan dalam kebijakan luar negeri Republik Turki pada masa Recep Tayyip Erdogan setelah mengalami penghapusan pada masa Mustafa Kemal Attaturk?

1.3 TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana identitas sufisme dapat kembali mempengaruhi kebijakan luar negeri Republik Turki. Oleh karena itu, diperlukan variabel penjelas untuk beberapa konsentrasi masalah, yaitu:

1. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki dalam kaitannya dengan sufisme.
2. Menjelaskan naik turunnya sufisme dan perkembangannya pada masa Mustafa Kemal Attaturk, Erbakan hingga Erdogan hingga berkembang lagi setelah mengalami kemunduran.

1.4 MANFAAT

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dalam program studi hubungan internasional terkait dengan pokok bahasan mengenai kultur, identitas dan kebijakan luar negeri serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan referensi pada penelitian yang

akan mendatang dalam program studi ilmu hubungan internasional terkait dengan pokok bahasan mengenai kultur, identitas dan kebijakan luar negeri.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Tingkatan Analisis

Studi tentang kebijakan luar negeri adalah studi dari kedua laporan atau kebijakan pengambil keputusan serta perilaku atau tindakan negara. Tingkat analisis yang digunakan dalam studi kebijakan luar negeri adalah individu, kelompok pemerintah (birokrasi atau partai yang sedang berkuasa), National self-image and culture, opini publik, politik domestik, dan Great Powers/sistem tingkat (posisi suatu negara dalam dunia internasional baik ada ataupun tidaknya pengaruh dari negara-negara besar/ yang berkepentingan) sistem tingkat Ini adalah perangkat heuristik atau alat yang membantu kita mengelola materi pelajaran kami. Tingkat analisis juga mengajukan pertanyaan yang berbeda dan memberikan jawaban yang berbeda untuk asing kebijakan teka-teki. Studi tentang kebijakan luar negeri terutama terletak di bidang hubungan internasional. Hubungan internasional didominasi oleh tiga pandangan dunia: realisme, liberalisme, dan Marxisme. Kebijakan luar negeri juga merupakan disiplin ilmu, yakni mengambil pelajaran dari kedua studi hubungan internasional dan studi perbandingan politik.¹⁸

Untuk penelitian ini pada kemunculan kembali identitas sufisme dalam kebijakan luar negeri Erdogan, maka unit analisis yang diambil adalah National

¹⁸ Laura Neack. The New Foreign Policy: power seeking in a globalized era. (United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.). 2008. Hal 27.

self-image and culture yang artinya menggunakan analisis negara dengan segala kebudayaannya disertai dengan beberapa contoh munculnya kultur dan identitas sangat dominan dalam perkembangan kebijakan negara. Yaitu Turki tetap mempertahankan Sekularisme sebagai ideologi negara, tetapi juga mengembangkan identitas Islam berupa Sufisme yang Zero Enemy Within a Neighbours.¹⁹

Hal ini diterangkan kembali oleh Neack tentang dua sisi yang saling mendukung antara kultur/identitas dengan National self-image and culture:

“ A culturally maintained national self-image does more than just influence the broad notions and directions of a country’s foreign policy. National self-image and the culture that supports it also influence the types of institutions constructed within a state and the foreign policy decisionmaking authority allotted to those institutions”.²⁰

Jadi berdasarkan kutipan dari Neack diatas dapat dikatakan bahwa kultur/identitas yang berasal dari masyarakat sipil (National self-image and culture), dapat mempengaruhi kebijakan institusi kenegaraan dan juga kepada otoritas yang berwenang dalam merencanakan kebijakan luar negeri.

¹⁹ Dalam hal ini Erdogan sangat menyadari bahwa sekularisme memang ideologi negara akan tetapi dalam perkembangannya sekularisme bukanlah ideologi yang filosofistik melainkan sebuah terjemahan gaya hidup yang diadopsi oleh Turki dari Barat. Akan tetapi Turki juga perlu kenyataan untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya kearah yang lebih evolutif dan harmoni baik bagi negaranya maupun negara lain.

²⁰ Laura Neack. Loc.cit. Hal 90.

1.5.2 Landasan Teoritik

Dalam perkembangannya sufisme mampu berkembang pesat di Kekhalifahan Usmani, maka yang menjadi penelitian dan kajian, diawali dengan mengambil teori-teori yang mendukung penelitian identitas Usmani dengan politik kebijakan luar negerinya.

1.5.2.1 Pendekatan Konstruktivisme Oleh Alexander Wendt dan Clunan

Konstruktivisme mempunyai asumsi dasar manusia adalah makhluk individual yang dikonstruksikan melalui realitas sosial. Artinya sebuah identitas itu sendiri adalah suatu bentukan atas suatu ciri dari struktur.

Constructivism is a structural theory of the international system that makes the following core claims: (1) states are the principal units of analysis for international political theory; (2) the key structures in the states system are intersubjective, rather than material; and (3) state identities and interests are in important part constructed by these social structures, rather than given exogenously to the system by human nature or domestic politics.²¹

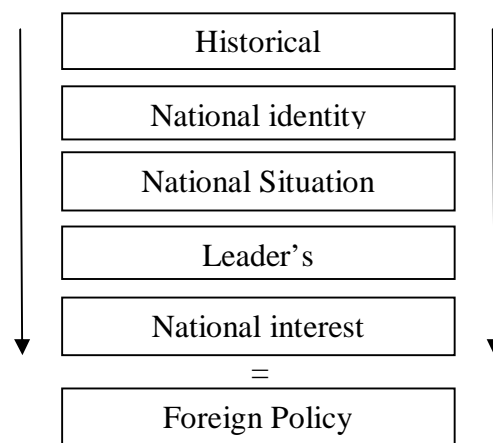
Dari gambaran tersebut, penelitian ini memiliki pola, Negara dan sistem internasional sebagai unit struktural. Kemudian Kedua, Konstruksi manusia akan melahirkan intersubyektivitas dalam artian ada subyek-subyek yang berperan lebih dalam kelingkungannya sebagai interaksi sosial. Gambaran umumnya, dengan proses interaksi sosial, manusia dapat saling memahami. Karena faktor identitas individu sangat penting dalam menjelaskan kepentingannya.

²¹ Alexander Wendt. 'Collective identity formation and the international state'. *American Political Science Review* 88 (1994), p. 384. Dalam Martin Griffith. *Fifty Thinkers in International Relations* (London, UK: Routledge Press, 1999). 199-204.

Dalam melihat hubungan antar sesama individu, nilai-nilai relasi atau hubungan itu, bukan hasil dari satu pihak saja yang berinteraksi, melainkan ada hubungan timbal balik untuk berinteraksi yang menghasilkan kesepakatan antar kedua belah pihak sehingga menciptakan realitas sosial yang diinginkan. Realitas sosial, identitas dan kepentingan negara merupakan hasil utama konstruksi atau bentukan dari proses interaksi tersebut dari pada diserahkan ke arah sifat dasar manusia (human nature).

Dalam pandangan Clunan tentang Aspirational Constructivism, identitas didasarkan pada kebanggaan sejarah bangsa dan hal ini mendorong negara untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi nasionalnya.²² Begitu juga studi kasus dalam Republik Turki sendiri. Identitas Islam sufi yang berasal dari Historical Legacy kembali dimunculkan Oleh Erdogan untuk membuat serangkaian kebijakan nasional untuk kebanggaan dan posisi negaranya di dunia internasional sehingga kebijakan tersebut menjadi dominan.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran: Pendekatan dan Alur Identitas



²² A. Clunan. "The Social Constructivism of Russia's Resurgence". (Baltimore: The John Hopkins University Press. 2009). Hal: 203

1.5.2.2 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri Oleh Valerie M. Hudson

Kebijakan luar negeri suatu negara perlu dianalisa untuk mengetahui sejauh mana dan apa yang mempengaruhi sehingga kebijakan itu dibuat. Karena dibutuhkan sebagai premis dasar bahwa hubungan internasional membahas bagaimana pengambil keputusan, baik individu bertindak sendiri-sendiri atau dalam kelompok, atau bahkan analisis kebijakan luar negeri terletak di persimpangan dari semua ilmu sosial dan bidang kebijakan, dan pengembangan faktor yang lain yang berkaitan dengan hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.²³ Kemudian secara partikular dibagi menjadi lima aspek dalam konteks pendekatan kebijakan luar negeri adalah:²⁴

- Individual Characteristics;
- Perceptions;
- Society and Culture;
- The Polity;
- The International System;

Pertama, Ideosincretic/individual characteristic adalah Psikologi Politik yang dapat membantu kita dalam memahami penentuan dan arah pemimpin. Meliputi kondisi stres yang tinggi, ketidakpastian yang tinggi, posisi dominan dari kepala negara dalam Keputusan Kebijakan Luar Negeri membuat karakteristik pribadi individu akan menjadi penting dalam memahami pilihan kebijakan luar negeri. Kedua, Perceptions sebagai peran persepsi dan gambaran dalam kebijakan

²³ Valerie M. Hudson. *Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations*. International Studies Association. (Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA, and 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK). (2005). Hal 21

²⁴ Valerie M. Hudson. *FPA Yesterday, Today and Tomorrow*. *Mershon International Studies Review*. Vol. 39 Issue2. (1995). Hal 226.

luar negeri adalah agenda penelitian yang sangat penting dalam analisis kebijakan luar negeri seperti analisa dan perkembangan kebijakan setiap tahunnya. Ketiga, Society and Culture sebagai Studi tentang budaya dan identitas yang menjadi determinan dalam negara, studi ini memulai kebangkitannya setelah berakhirnya Perang Dingin disertai topik tentang studi keamanan, dan postmodernisme. Keempat, The Polity, menjelaskan kelompok-kelompok tertentu dalam negara dapat mempengaruhi serangkaian kebijakan luar negeri, situasi keamanan dan stabilitas kawasan. Kelima, International System, berupa terdapat keadaan dan kesepakatan internasional terhadap situasi yang terjadi di dunia internasional.²⁵ Dalam kasus Turki, penelitian ini menggunakan Individual characteristic sebagai eksekutor/fasilitator yang berawal dari adanya keinginan kembali akan kebesaran bangsa pada masa lalu, berupa pengaruh kebangkitan kembali sufisme-usmani. Pola ini kemudian ditandai dengan adanya gerakan masyarakat sipil untuk memulihkan kegiatan ekonomi pasca kudeta Perdana Menteri Necmetin Erbakan yang secara kultural praktik memiliki hubungan dengan ideologi Islamis sebagai negara mayoritas Muslim. Dalam ruang politik yang semakin terbuka di era Perdana Menteri Erdogan, gerakan Islamis masyarakat terbukti menjadi elemen penting dalam pertumbuhan masyarakat sipil di Turki.²⁶ Jadi kemudian dalam perkembangannya, keadaan ini diberdayakan oleh para otoritas pengambil kebijakan seperti Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Gul dan Ahmet Davutoglu sesuai dengan National self-image and culture yang sedang berkembang dalam

²⁵ Valerie M. Hudson. Loc. cit. Hal 8-18

²⁶ Jenny White dalam Ahmad Dzakirin. Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu. (Solo: Eralintermedia). 2012. hal: 279-280.

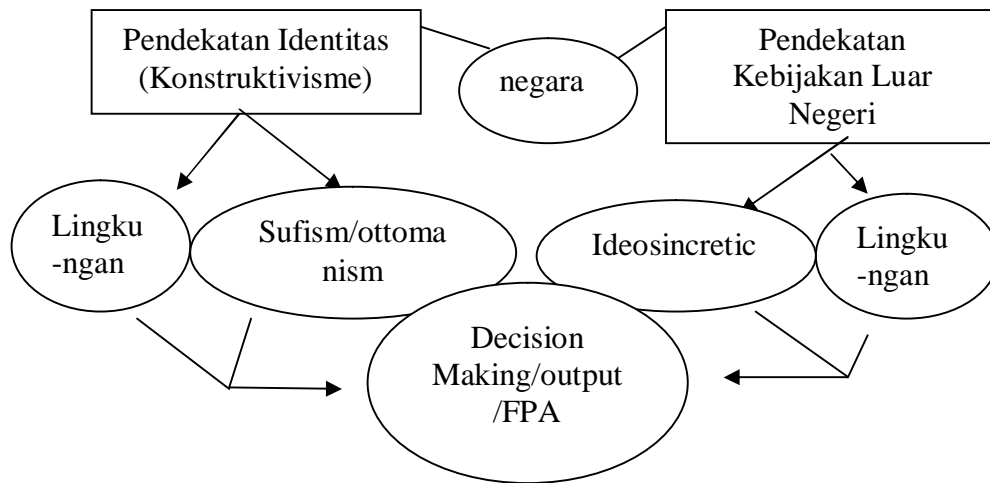
bentuk gerakan Islamis sehingga menghasilkan kebijakan nasional maupun kebijakan luar negerinya yang kemudian berdampak pada segi ekonomi, kebudayaan, politik dan hubungan kerjasama Turki dengan Uni Eropa dan dunia Arab.

1.5.2.3 Sintesis

Berdasarkan teori-teori yang diambil, seperti pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt yang mengedepankan identitas negara, dalam hal ini disebut sebagai ideologi negara Republik Turki dengan semangat Islam Sufisme yang dipadukan dengan National self-image and culture sekular sebagai media dan kepentingan negara adalah hasil konstruksi dari interaksi sosial individu, lingkungan sosial dan perangkat perangkat seperti sebelumnya. Kedua, pengambilan pendekatan kebijakan luar negeri dari Valerie M. Hudson, bahwa kebijakan luar negeri Republik Turki adalah hasil dari kekuatan, pengetahuan, sosio-kultur dan interaksi pemimpin dalam menjalankan dan memahami faktor utama yakni menciptakan formulasi kebijakan luar negeri guna penentuan sikap internasional terhadap negaranya.

Grafik 1.2

Kerangka Sintesis



1.5.3 TINJAUAN PUSTAKA

Ide-ide sufisme menjadi sebuah identitas dalam tubuh kekhalifahan usmani tahun 1299 sampai pada tahun 1900. Setelah kekhalifahan usmani runtuh akibat kekalahan dalam perang dunia I. Kemudian dilanjutkan oleh revolusi sosial secara menyeluruh oleh Mustafa Kemal Attaturk dengan menghapuskan semua sisa-sisa kekhalifahan islam menjadi republik sekular tahun 1924.

Setelah terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri Republik Turki, maka ada beberapa kebijakan yang sebelumnya dilarang pada masa Mustafa Kemal Attaturk, seperti pelarangan penggunaan bahasa Arab dan ditutupnya madrasah serta masjid. Namun sejak Erdogan diangkat menjadi Perdana Menteri, situasi tersebut mengharuskan negara ini untuk kembali membuka madrasah dan membuka kembali segala aktifitas peribadatan. Masalah-masalah dan fenomena tersebut telah menelaah jauh di negara selain Republik Turki. Yakni, China, Prancis dan Amerika Serikat tentang bagaimana pendekatan kebangkitan

identitas, hingga kemudian bangsa tersebut dapat dikenal luas di percaturan politik internasional.

1.5.3.1 Konfusianisme China

Filsuf utama yang harus disebut adalah Konfusius, yang hidup antara 552 dan 479 S.M. Melihat kekacauan dan perebutan kekuasaan antara raja-raja pada waktu itu, ia menganjurkan ajaran harmoni antara manusia dengan alam maupun antara manusia dengan manusia. Sekiranya masing-masing bertindak dan menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya, maka tidak akan terjadi perebutan kekuasaan. Bukan hanya rumah tangga, tetapi negarapun akan menjadi tenteram. Hal tersebut terlihat sekali dalam China's Independent Foreign Policy of Peace dibawah ini:

“China opposes hegemonism and preserves world peace. China believes that all countries, big or small, strong or weak, rich or poor, are equal members of the international community. Countries should resolve their disputes and conflicts peacefully through consultations and not resort to the use or threat of force. Nor should they interfere in others' internal affairs under any pretext. China never imposes its social system and ideology on others, nor allows other countries to impose theirs on it”.²⁷

Cina percaya bahwa semua negara adalah anggota yang sama dari masyarakat internasional. Negara harus menyelesaikan sengketa/konflik mereka

²⁷ China's Independent Foreign Policy of Peace (online) dalam <http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/wjzc/t24881.htm>, (diakses 12 Desember 2011).

secara damai melalui konsultasi sepihak dan tidak menggunakan ancaman kekerasan.

1.5.3.2 Liberalisme Amerika Serikat

Ide-ide Liberalisme di Amerika Serikat memperlihatkan adanya keserasian baik didalam politik dalam negeri dan politik luar negerinya. Hal ini terlihat pada pernyataan berikut:

“Commercial liberalism promotes the idea of free trade and commerce across state borders on the assumption that economic interdependence among states will reduce incentives to use force and raise the cost”.²⁸

Jadi siapapun Presiden Amerika Serikat, entah itu berasal dari Partai Demokrat Atau Partai Republik maka, kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya tetap meneruskan dan mengembangkan nilai nilai dan identitas liberalisme seperti perdamaian, free trade dan kerja sama antar negara yang saling membutuhkan.

1.5.3.3 Nasionalisme Prancis

Prancis adalah salah satu negara yang menerapkan sistem nasionalisme Raison d’etre negara dengan triloginya yakni Liberte (Kebebasan), Egalite (Persamaan/Kesetaraan) dan Fraternite (Persaudaraan).

²⁸ Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, International Relations: The Key Concept (London dan New York: Routledge Press). Hal: 180-182.

“France’s foreign policy is founded on several centuries of diplomatic tradition and some fundamental principles: the right of peoples to self-determination, respect for human rights and democratic principles, respect for the rule of law and cooperation among nations. Within this framework, France’s concern is to preserve its national independence while at the same time working to foster the European construction as well as regional and international solidarity.”²⁹

Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Prancis yang bersedia bekerja sama dengan negara atau bangsa lain. Salah satu kebijakannya adalah menjadi aktor penting dalam Institusi seperti Uni Eropa, menjadi salah satu pihak yang dapat mengkomunikasikan dengan pihak lain berdasar pada pembuatan kebijakan domestik utk kebijakan luar negeri.

The permanent representation of France in the European Union plays a key role in expressing France’s positions within the European institutions. Subject to the authority of an ambassador, the capital’s administrative relay is responsible for watching over the establishment of a coherent connection between the national decision-making system and that of the EU.³⁰

Semua ideologi tersebut sebagai bentuk identitas yang dikhususkan dan dipakai oleh negara tersebut guna pencapaian kebijakan luar negeri yang selaras, stabil dan harmonis, sehingga memiliki masa di negaranya masing-masing. Hal ini ada keterkaitan landasan ideologi seperti kemunculan kembali ide/ajaran sufisme

²⁹ France Foreign Policy (online) dalam <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france/france-in-the-world/france-s-foreign-policy/article/principles> (diakses 12 desember 2011)

³⁰ France in European Union (online) dalam <http://www.diplomatie.gouv.fr/en/european-union/> (diakses 12 desember 2011)

dan Islam yang menekankan pada identitas diri yang harmoni, stabil, evolutif pada masa Erdogan setelah penghapusan tahun 1924.

1.5.3.4 Studi Empiris

Studi kasus mengenai Turki dalam penelitian ini, saat Tayyip Erdogan menjadi Perdana Menteri Republik Turki, ia memasukkan kembali ideologi sufisme dalam serangkaian kebijakannya luar negerinya.³¹ Hal ini bisa disebut sebagai kemunculan baru sufisme-neo ottomanisme.

Dalam kasus tertentu identitas mayoritas dapat menjadi ideologi besar dalam suatu negara, misalnya Uni soviet dengan Amerika yang mempertahankan ide Komunisme dengan Kapitalisme-nya ketika perang dingin berlangsung tajam tahun 1960.³² Oleh karena itu, berbeda sekali dengan kasus Turki, sufisme diciptakan tokoh agama Maulana Jalaludin Rumi dan tarekat maulawiyah. Analisisnya, sufisme adalah identitas minoritas dalam tubuh Usmani yang perlahan-lahan mampu menampung dan menjadi tumpuan eksistensi jalannya pemerintahan negara/kekhalifahan.³³

Berawal dari satu pernyataan, mengapa sufisme sebagai ideologi identitas minoritas dapat menjadi tumpuan dan arahan kebijakan luar negeri Republik Turki, meskipun ide ini pernah tenggelam. Dari sudut pemimpin, Faktor pertama, kepemimpinan Erdogan yang mengedepankan kebijakan luar negeri

³¹ Kemajuan Signifikan Republik Turki" (online) dalam <http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-union.en.mfa> (diakses 12 desember 2011)

³² Martin Griffith, *Fifty Thinkers in International Relations* (London, UK: Routledge Press, 1999). 203

³³ M. Arfan Muamar. *Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler?(kasus Turki)*. (Ponorogo, Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007), hal: 28-29.

yang harmonitas (sufistik) terhadap segala kalangan dan merangkul semua golongan di dalam dan diluar negerinya seperti yang dilakukan Perancis, Amerika Serikat dan China. Faktor kedua, situasi nasional yang mengharuskan Republik Turki untuk menjadi yang terdepan dalam membentuk interaksi, kontruksi internasional sehingga perdamaian sebagai realita sosial dapat tercipta seperti apa yang diinginkan. Faktor ketiga, ada kebanggaan tersendiri dari masyarakat Turki mengenai kejayaan bangsanya dahulu, sehingga ada keinginan kejayaan tersebut kembali dituangkan dalam pola kebijakan luar negeri negaranya.

1.6 HIPOTESIS

Dari landasan dan kesimpulan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sementara untuk pengumpulan data. Ada beberapa kesimpulan sementara untuk menjawab pertanyaan.

Pertama, faktor penyebab mengapa identitas sufi kembali muncul adanya situasi nasional yang mengharuskan Republik Turki untuk bergerak menuju percaturan kerjasama internasional yang damai dan menghargai semua, seiring dengan adanya dinamisnya gerakan Islamis masyarakat sipil Turki.

Kedua, proses Aspirational Contructivism (konsep pengembangan bangsa yang berasal dari kejayaan bangsa di masa lalu) dari Republik Turki sehingga identitas didasarkan pada kebanggaan sejarah bangsa dan hal ini mendorong negara dan pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi nasionalnya. Pertama, mengarah kegiatan berdiplomasi yang beretika, penyelesaian konflik yang jelas dan bermartabat (rhythmic diplomacy). Kedua,

menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, yang bersifat multi dimensional (multi-dimensional foreign policy). Ketiga, menjalin hubungan yang sangat baik, dekat dan ramah kepada negara sekitar Republik Turki (zero problems with neighbors).

Keempat, menjadikan Republik Turki sebagai media, aktor yang berinisiatif menyelesaikan masalah dalam kajian politik internasional (order instituting actor). Kelima, menjadikan Republik Turki sebagai negara yang tidak hanya mampu memfasilitasi, menghubungkan kaidah kerjasama internasional dengan negara-bangsa tetapi juga mampu menjalin baik kerjasama dengan organisasi internasional (international cooperation). Keenam, ikut serta dalam kebijakan luar negeri yang proaktif, netral, dan menjunjung tinggi nilai fleksibilitas (proactive foreign policy). Oleh karena itu, terdapat dampak dan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi ekonomi, politik, kebudayaan dan berinteraksinya Republik Turki dengan Uni Eropa serta dunia Arab yang kemudian difasilitasi oleh negara. Hal ini sesuai dengan visi AKP yang mendukung adanya pasar bebas, kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar dan masuknya Republik Turki dalam Uni Eropa. Namun dalam visi AKP selanjutnya juga menyebutkan bahwa agama juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam tatanan sosial umat manusia.

1.7 METODOLOGI PENELITIAN

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1.7.1.1 Kekhalifahan dan Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Khalifah adalah pemimpin, wakil atau pengganti (Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya). Sedangkan Kekhalifahan adalah Negara dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah dengan menjalankan syariat (hukum Islam) di kehidupan negara.³⁴ Dalam sejarahnya, kekhalifahan berawal dari Nabi Muhammad yang berperan dan menjalankan kehidupan sebagai nabi/rasul, pembuat hukum, pemimpin agama, hakim, komandan pasukan dan kepala pemerintahan sipil. Setelah wafatnya Muhammad SAW, khalifah menjalankan tugas seperti Nabi Muhammad SAW, kecuali sebagai nabi/rasul hanya Muhammad SAW saja khalifah tidak boleh membenarkan dirinya sebagai nabi/rasul.³⁵

Dalam hal politik khalifah memiliki wewenang umum sebagai pemelihara dan mempertahankan iman, memerangi kafir dan menghapus bid'ah, memperluas negara Islam (Dar al-Islam).³⁶ Secara khusus fungsi khalifah menurut mazhab Sunni adalah melindungi dan mempertahankan iman wilayah Islam, menyatakan perang suci/jihad (jika keadaan darurat), mengangkat pejabat negara, menarik pajak, dan mengatur dana masyarakat, menghukum orang yang melanggar hukum dan menegakkan keadilan. sedangkan fungsi khalifah menurut Syiah adalah imamah, yakni khalifah yang berhak menatur agama dan politik berasal dari

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan Nasional: Balai Pustaka).

³⁵ Philip K. Hitti. *History of The Arab's* (Terj.). (Jakarta: Serambi). Hal 567-576.

³⁶ Thomas W. Arnold. *The Chaliphate* (Oxford). 1924. Hal 9-41 dalam Philip K. Hitti. *History of The Arab's* (Terj.). (Jakarta: Serambi). Hal 567-576.

keturunan Nabi Muhammad SAW.³⁷ Oleh karena itu, definisi konseptual tersebut menciptakan definisi operasional dalam fokus penelitian ini adalah kekhalifahan Usmani, maka kekhalifahan Usmani adalah kekhalifahan/sistem negara yang terletak di Turki antara tahun 1299-1924 yang dipimpin oleh seorang khalifah, baik berupa sultan/raja yang menjalankan dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam sendi-sendi pemerintahan negara.

1.7.1.2 Sufisme Dalam Kekhalifahan

Sufi adalah ahli ilmu tasawuf/ilmu suluk. Sedangkan Sufisme adalah nama umum bagi aliran Sufi di dalam agama Islam.³⁸ Sufisme dalam kekhalifahan Usmani dahulunya memiliki pengaruh besar Sehingga apapun kebijakan kekhalifahan juga tidak lepas dari apa yang diadopsi dari nilai/ide-ide Sufisme seperti melindungi seluruh wilayahnya dengan wilayah lain.³⁹ Tasawuf merupakan bentuk mistisme dalam Islam, bukan suatu ajaran tetapi sebuah sekte yang memiliki modus pemikiran dalam kerangka agama. Secara psikologis dan kehidupan sehari-hari untuk mencapai kedamaian adalah dengan mendekatkan diri pada Tuhan secara langsung. Sufisme kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok Sufi atau Tarekat. Dalam kekhalifahan Usmani yang paling terkenal adalah Tarekat Maulawiyah oleh Maulana Jalaludin Rumi.⁴⁰ Sehingga,

³⁷ Al Mawardi, et.al dalam Philip K. Hitti. *History of The Arab's* (Terj.). (Jakarta: Serambi). Hal 567-576.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan Nasional: Balai Pustaka).

³⁹ Itzhak Weismann. *The Politics Of Popular Religion: Sufis , Salafis , And Muslim Brothers In 20th-Century Hamah*. (US: Int. J. Middle East Study). 2005. Hal 39-58.

⁴⁰ Jahiz Bayan. Jilid I hal 253 dalam Philip K. Hitti. *History of The Arab's* (Terj.). (Jakarta: Serambi). Hal 567-576.

dalam penelitian ini menjelaskan ide-ide Sufisme Islam dapat mempengaruhi kebijakan kekhalifahan Usmani selama kekhalifahan tersebut berkuasa .

1.7.1.3 Harmoni

Harmoni adalah keseimbangan, keserasian, dan kecocokan. Keharmonisan adalah keselarasan. Sedangkan harmonisasi adalah pencarian keselarasan, penciptaan keharmonisan dan keserasian.⁴¹ Prinsip tersebut adalah salah satu prinsip dasar dalam Sufisme.⁴² Untuk lebih jelasnya, harmoni dalam definisi operasional penelitian ini adalah strategi kebijakan yang diambil oleh Republik Turki untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hubungan kenegaraannya dengan harapan bahwa segala tindakan Republik Turki sebagai negara penghubung Eropa dengan Asia terdapat kecocokan, khususnya antara Uni Eropa dan dunia Arab.

1.7.1.4 Perdamaian

Perdamaian adalah penghentian permusuhan. Berasal dari kata “damai” yang artinya tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, rukun dan keadaan tidak bermusuhan.⁴³ Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ide Sufisme Islam yang kembali dianut oleh Republik Turki saat ini dengan mengajak semua pihak untuk dapat saling hidup berdampingan, damai dan stabil. Maka definisi operasional dari penelitian ini adalah menjelaskan prinsip Sufisme pada masa dulu yang damai, stabil dan hidup

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Gitamedia Press)

⁴² Itzhak Weismann. Loc.cit. 2005.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kementerian Pendidikan Nasional: Balai Pustaka).

berdampingan dengan tetangga/negara-tetangga, kini tercermin dalam kebijakan Republik Turki yakni “zero enemy with neighbour’s”.

1.7.1.5 Neo-Ottomanism (New Ottoman – Ottoman/ kebangkitan Usmani Baru)

Neo-Ottomanisme adalah konsep negara. Konsep yang berawal dari Ottomanisme pada era kekhalifahan Usmani yang didominasi oleh ide-ide Sufisme. Neo-Ottomanisme sebenarnya konsep lama, hanya saja Neo-Ottomanisme pernah menghilang pada masa Mustafa Kemal Attaturk hingga kemudian dimunculkan kembali pada era Perdana Menteri Erdogan.⁴⁴ Maka, definisi operasional yang diambil dari penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara Ottomanisme kekhalifahan Usmani dengan neo-Ottomanisme kebijakan luar negeri Republik Turki saat ini.

1.7.1.6 Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP – Justice and Development Party)

AKP atau yang lebih dikenal sebagai Partai Keadilan dan Pembangunan adalah partai yang dibentuk pada tahun 2001 oleh Presiden Abdullah Gul dan Perdana Menteri Erdogan. Mereka menyebut diri dan partainya sebagai kubu reformis yang ingin menyatakan diri adanya perubahan dalam pemerintahan Republik Turki yang dikuasai oleh kaum konservatif. Pada tahun 2002-2012 AKP

⁴⁴ The doctrine was first articulated by prominent liberal, secularist journalist Cengiz Çandar, dalam Nora Fisher Onar. *Neo Ottomanism, Historical Legacies And Turkish Foreign Policy*. (Department of Politics and International Relations Bahçesehir University. 2009).

memenangkan pemilu dan memegang penuh dinamika perpolitikan dan pemerintahan di Republik Turki. Proses ini tidak lain adalah karena visi AKP yang mendukung adanya pasar bebas, kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar dan masuknya Republik Turki dalam Uni Eropa. Namun dalam visi AKP selanjutnya juga menyebutkan bahwa agama juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam tatanan sosial umat manusia.⁴⁵

1.7.1.7 Aspirational Constructivism

Dalam pandangan Clunan tentang Aspirational Constructivism, identitas didasarkan pada kebanggaan sejarah bangsa dan hal ini mendorong negara untuk membuat kebijakan sesuai dengan kondisi nasionalnya.⁴⁶ Studi kasus dalam Republik Turki adalah suatu proses kembalinya identitas dan ajaran sufisme yang dikembalikan dari aspirasi masyarakat Turki kembali dimunculkan oleh keinginan masyarakat Turki yang kemudian difasilitasi oleh kubu reformis AKP untuk membuat serangkaian kebijakan nasional untuk kebanggaan dan posisi negaranya di dunia internasional sehingga kebijakan tersebut menjadi dominan.

1.7.1.8 Kebijakan Luar Negeri

Menurut Plano dan Olton serta analisis dari Morgenthau tentang serangkaian kebijakan luar negeri adalah suatu konsep yang dibangun atas

⁴⁵ Ahmad Dzakirin. *Kebangkitan Pos-Islamisme: Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. (Solo: EralIntermedia). 2012. hal: 35

⁴⁶ A. Clunan. *"The Social Constructivism of Russia's Resurgence"*. (Baltimore: The John Hopkins University Press. 2009). Hal: 203.

pikiran, kalimat serta pencapaian aksi dari kepentingan (national interest) dari suatu negara. Negara dapat memainkan peran terkait hubungannya dengan antar negara maupun negara dengan aktor bukan negara.

“For the purpose of analysis, the concept of foreign policy is understood to have consists of statements and actions taken by a state subject to its relations with other external actors, states or non-state actors. It is responsive to the actions of other states and is taken to fulfil national interests outside territorial boundary. Equally, foreign policy is a continuation of domestic policy because it serves and reflects national interests.”⁴⁷

Holsti juga berpendapat bahwa serangkaian kebijakan luar negeri dibangun atas 4 (empat) elemen secara bertahap: foreign policy orientations (orientasi/visi kebijakan luar negeri), national roles (peran nasional dalam politik global), objectives (tujuan jangka panjang), and actions (hasil interaksinya dengan negara lain).⁴⁸ Dalam kaidah lain Smith menjelaskan bahwa yang mendasari terciptanya politik luar negeri suatu negara berasal dari pendekatan sejarahnya yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, ideologi, dan letak geografis (An historical approach tends to describe broad trends in states’ foreign policies and relates those policies to the social, economic, ideological, and geographic conditions within a certain period of time).⁴⁹

⁴⁷ Jack C Plano. & Ray Olton, *International Relations Dictionary*, (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969). Hal: 1-10. ; Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 4th edition, New York: Alfred A. Knopf, 1978) Hal: 1-10. Dalam Vinsensio Dugis. *Analysing Foreign Policy*, (Surabaya: Airlangga University, t.t). Hal: 1-10

⁴⁸ K. J Holsti. *International Politics, A Framework for Analysis*, 4th edition, (London: Prentice Hall, 1983). Dalam Vinsensio Dugis. *Analysing Foreign Policy*, (Surabaya: Airlangga University, t.t). Hal: 1-10

⁴⁹ Steve Smith “Foreign Policy Analysis and International Relations,” in Hugh C. Dyer & Leon Mangasarian (eds.), *The Study of International Relations, The State of the Art*, (London:

Dalam kasus Republik Turki era pemerintahan Erdogan dapat dikatakan kebijakan luar negeri Republik Turki Zero Enemy Within Neighbour's didukung oleh visi Partai AKP dan letak geografis Turki yang berada sebagai jalan tengah antara Asia dan Eropa lebih menekankan kepada kebijakan luar negeri yang harmonis sehingga keadaan ini dimanfaatkan dengan berhubungan baik dengan semua negara. Baik terdapat kerjasama kepentingan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah eksplanatif, yakni menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain. Oleh karenanya tipe penelitian ini menggunakan hipotesis yang kemudian akan diuji.⁵⁰ Produk dari penelitian ini adalah berpikir eksplanatif mengarahkan peneliti dengan adanya hipotesis sebagai gambaran untuk meringkas situasi/variabel yang sedang terjadi maka hipotesis bukanlah jawaban akhir penelitian. Hipotesis adalah kesimpulan/ Pernyataan sementara tentang suatu gejala. Oleh karena itu, dideskripsikan dalam bentuk dugaan kerja atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan adanya hubungan tersebut.⁵¹

Dalam penelitian ini, hipotesis akan dibantu oleh dasar pemikiran yakni pendekatan identitas yang dipaparkan oleh Alexander Wendt tentang identitas dan sedikit memaparkan tentang aspirational constructivism dari Clunan serta

Macmillan, 1989). Dalam Vinsensio Dugis. *Analysing Foreign Policy*, (Surabaya: Airlangga University, t.t). Hal: 1-10

⁵⁰ Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press). 2001. Hal. 51

⁵¹ Burhan Bungin, *Ibid*, Hal 4-5

pendekatan kebijakan luar negeri oleh Valerie M. Hudson serta tingkatan analisis Society and Culture oleh Laura Neack dan juga dibantu oleh data-data yang sudah terkumpul. Selebihnya, penelitian akan dianalisis dengan cara eksplanatif dengan melibatkan kerangka pemikiran, tingkatan analisis dan berdasar data-data yang ada.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup/jangkauan penelitian adalah batasan waktu sampai dimana penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dan tertata sehingga dengan adanya jangkauan penelitian akan menambah batasan keabsahan data dan tidak terlampaui jauh dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan. Penelitian ini dibatasi oleh masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan antara tahun 2003 hingga 2012.

Pemilihan jangkauan penelitian ini didasarkan pada terpilihnya Erdogan sebagai Perdana Menteri (PM) Republik Turki dari partai bernafaskan identitas Sufisme Islam yakni AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi- Partai Keadilan dan Pembangunan), sehingga mempengaruhi identitas Turki yang Sekuler dikembalikan menjadi identitas Sufisme Islam Baru (neo-ottoman), meskipun dalam perkembangan identitas Turki mengalami naik turun pada masa kekhalifahan Usmani yang sufisme kemudian berubah dalam masa pemerintahan Kemal Attaturk, hingga masa peralihan Islami transisi era Necmettin Erbakan. Dinamika tersebut cukup representatif untuk menjawab permasalahan munculnya

kembali identitas sufisme pada masa Erdogan sehingga penelitian ini tidak bersifat final dan dapat dilanjutkan dengan fakta-fakta/fenomena baru.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam kejelasan lebih lanjut mengenai penelitian ini karena penelitian ini bersifat eksplanatif maka teknik pengumpulan data yang diambil adalah metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan menelusuri data dan fakta historis.

Secara mendetail asal data dari komponen metode dokumenter terdiri dari:

(1) Autobiografi/biografi, (2) Surat pribadi, buku, catatan harian, dan memorial, (3) Kliping/jurnal, (4) Dokumen pemerintah maupun swasta, (5) Cerita roman, (6) Film, mikrofilm/video, foto, dan sebagainya.⁵²

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data dari internet/online juga dapat digunakan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.⁵³ Teknik pengumpulan data ini melibatkan beberapa buku dari penulis/pengamat yang meneliti permasalahan identitas Sufisme, Republik Turki dan Neo-Ottomanisme seperti Philip K. Hitti, Arfan Muammar, Ahmad Dzakirin, Syarif Thagian, serta situs resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Turki, dan lain sebagainya. Sedangkan cara memperolehnya data dokumenter tersebut dapat diperoleh dari sumber tertulis, dokumentasi terekam, dalam berupa buku, autobiografi, jurnal, dokumen resmi pemerintah Republik Turki, foto-foto kenegaraan, ataupun

⁵² Burhan Bungin, Ibid, Hal 152-153.

⁵³ Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya (Jakarta: Kencana). 2007 Hal 121 Dalam Radityo Dharmaputra (PDF) "Identitas dan Kebijakan Luar negeri : Pengaruh Nilai nilai Eurasianisme Terhadap Kebijakan Luar negeri Rusia Tahun 2004-2009". Hal 23. (Tulisan Tidak Dipublikasikan).

rekaman pidato, video teknik pengumpulan data diatas digunakan sebagai dasar penunjang dalam penelitian ini lebih jauh mengenai bangkitnya sufisme dalam kebijakan luar negeri Republik Turki saat ini.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang diambil oleh penulis adalah analisis dokumen dikarenakan pada penjelasan sebelumnya penulis menggunakan teknik/metode pengumpulan data dokumenter. Oleh karena itu data yang sebelumnya telah terkumpul akan segera dianalisis.⁵⁴

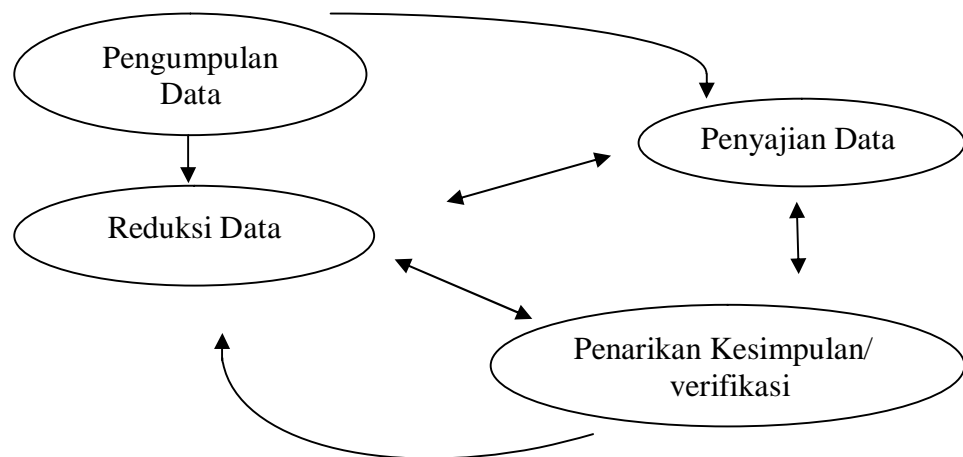
Dalam keterangan selanjutnya teknik analisis dokumenn menurut Miles dan Huberman, metode analisis dapat diterangkan dengan metode analisis kualitatif yang memberi gambaran baru atau memperdalam gambaran yang sudah ada. Hal ini dipaparkan dalam model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama: (a) reduksi data sebagai batasan data yang akan diambil, (b) pengumpulan data sebagai landasan penguata serta indikator jawaban, (c) penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁵ (Lihat Grafik 1.3)

⁵⁴ Burhan Bungin, Op.Cit, Hal 173

⁵⁵ M.B. Miles dan A.M. Huberman. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi. (Jakarta: UI Press). dalam Muhammad Idrus. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Edisi Kedua). (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: Erlangga). 2009. Hal 147-148.

Grafik 1.3

Model Interaktif Miles dan Huberman



(Sumber: M.B. Miles dan A.M. Huberman. Analisis Data Kualitatif. dalam Muhammad Idrus. 2009)

Tahap pengumpulan data telah diungkap dimuka berupa penelusuran sumber tertulis, foto dan lain sebagainya. Dengan ditemukannya tahap pengumpulan data sebanyak-banyaknya karena penelitian ini bersifat eksplanatif maka langkah kedua adalah melakukan reduksi data, yakni pemilihan, pemusatan penyederhanaan data selama penelitian tersebut berlangsung sehingga pada perkembangan selanjutnya akan menemui titik temu sederhana tentang penelitian yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, penyajian data yang sudah terlampau detil dan sederhana tadi diolah dan disajikan data tersebut sebagai hasil dari penyajian reduksi data. Dengan demikian data yang telah di sajikan dapat di verifikasi sesuai kaidah keteraturan dan interpretasi sehingga akan menghasilkan kesimpulan.⁵⁶ Dengan hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam mencari data mengenai, sufisme, national self-image and culture Republik Turki, pola

⁵⁶ M.B. Miles dan A.M. Huberman. Ibid. Muhammad Idrus. Hal 148-152

perkembangan kebijakan antara masa Mustafa Kemal Attaturk, Necmettin Erbakan hingga Erdogan saat ini.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Bab 1 memaparkan tentang hal-hal yang mendasari penelitian ini. Seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Bab ini juga berisi tinjauan pustaka yang membahas keterkaitan garis besar pemikiran yang digunakan dalam keseluruhan pemikiran ini. Memuat tingkatan analisis, kerangka pemikiran serta kesimpulan sementara/hipotesis yang membantu pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian ini. Sedangkan aspek metodologi terdiri atas definisi konseptual-operasionalisasi konsep, tipe/jenis penelitian yang digunakan, jangkauan penelitian dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis. Bab 2 sebagai bab selanjutnya, memaparkan tentang ajaran dasar sufisme dan pemerintahan era kekhalifahan usmani (ottoman) hingga penjelasan singkat Mustafa Kemal Attaturk. Bab 3 akan memaparkan tentang kemunculan gerakan Islam di Republik Turki sekular yang dimulai oleh Perdana Menteri Necmetin Erbakan. Bab 4 memaparkan relevansi ide/ajaran sufisme, prinsip kebijakan luar negeri Republik Turki hingga kebangkitan sufisme dalam keterkaitannya mempengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri Republik Turki dalam rangka Neo-ottomanism pada era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Bab 5 memaparkan tentang kesimpulan atau hasil dan saran-saran penelitian yang dilakukan penulis.